



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 85
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP SEKRETARIS DAERAH 
2	DRS. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH PLT. KARO HUKUM 
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, KARO ORGANISASI M.Si 

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 59

No.	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 59 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 85 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Tata Usaha				1		
	2) Pengadministrasi Umum				1		
	3) Pengadministrasian Kepegawaian				1		
	4) Analis Barang Milik Negara				2		
	5) Analis Data dan Informasi				1		
	6) Analis Perhubungan dan Telekomunikasi				1		
	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Analis Perencanaan Anggaran				1		
	2) Bendahara				2		
	3) Analis Perencanaan				2		
	4) Verifikator Keuangan				2		
	5) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	6) Pengadministrasian Keuangan				2		

2.	Kepala Bidang Perhubungan Darat		1			
	a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat			1		
	1) Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan				1	
	2) Pengelola Sarana Angkutan				1	
	3) Analis Teknik Survey Pemaduan Moda Transportasi Darat				1	
	4) Analis rencana Induk Jaringan Transportasi Darat				1	
	b. Kepala Seksi Angkutan Darat			1		
	1) Pengawas Keselamatan Angkutan				1	
	2) Analis Angkutan Darat				3	
	3) Teknisi Survey Angkutan Jalan				2	
	c. Kepala Seksi Lalu Lintas Perhubungan Darat			1		
	1) Analis Lalu Lintas				1	
	2) Pengelola Data Jaringan Jaringan Transportasi Jalan				2	
	3) Pengelola Pengawasan LLAJ				2	
	4) Pengelola Rekayasa Lalu Lintas				2	
3.	Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Kereta Api		1			
	a. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara			1		
	1) Pengawas Keselamatan Udara				1	
	2) Analis Angkutan Udara				1	
	b. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api			1		
	1) Pengelola Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian				1	
	2) Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria Bangunan dan Jalur				1	

	c. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Udara dan Kereta Api			1			
	1) Pengelola Audit Keselamatan Perkeretaapian				1		
	2) Pengelola Sarana Angkutan				1		
	3) Pengawas Transportasi				1		
	4. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP		1				
	a. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut			1			
	1) Analis Lalu Lintas				1		
	2) Analis Angkutan Laut				1		
	3) Pengawas dan Pembina Angkutan				1		
	b. Kepala Seksi Lalu Lintas dan ASDP			1			
	1) Pengelola Data Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan				1		
	2) Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1		
	3) Analis Instrumentasi dan Kontrol Kapal				1		
	4) Pengelola Keselamatan dan Keamanan Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan				1		
	5) Pengelola Pemeriksa Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan SDP				1		
	c. Kepala Seksi Kepelabuhanan			1			
	1) Analis Kesyahbandaran				1		
	2) Pengawas Pelabuhan				3		
	3) Analis Pelabuhan				1		
	4) Analis Pelayaran				1		
	5) Operator Terminal				3		
	5. Jabatan Fungsional Tertentu						
	1) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan					1	
	2) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana					1	

	3) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula					3	
	Jumlah	1	4	11	58	5	
	Jumlah Total	79					

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

	3) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula					3	
	Jumlah	1	4	11	58	5	
	Jumlah Total			79			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No		
1	DR. H. SURIAHSYAH, M. AP SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M. SI AIDISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH PLT. KARD HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, KARD ORGANISASI M. SI	

3) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula						3	
Jumlah	1	4	11	58	5		
Jumlah Total			79				

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 59

No.	NAMA	JABATAN
1	DRS. H. ZAIMUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, S.H	PLT. KARD HUKUM N
3	DRS. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARD ORGANISASI



	3) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula					3	
	Jumlah	1	4	11	58	5	
	Jumlah Total			79			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

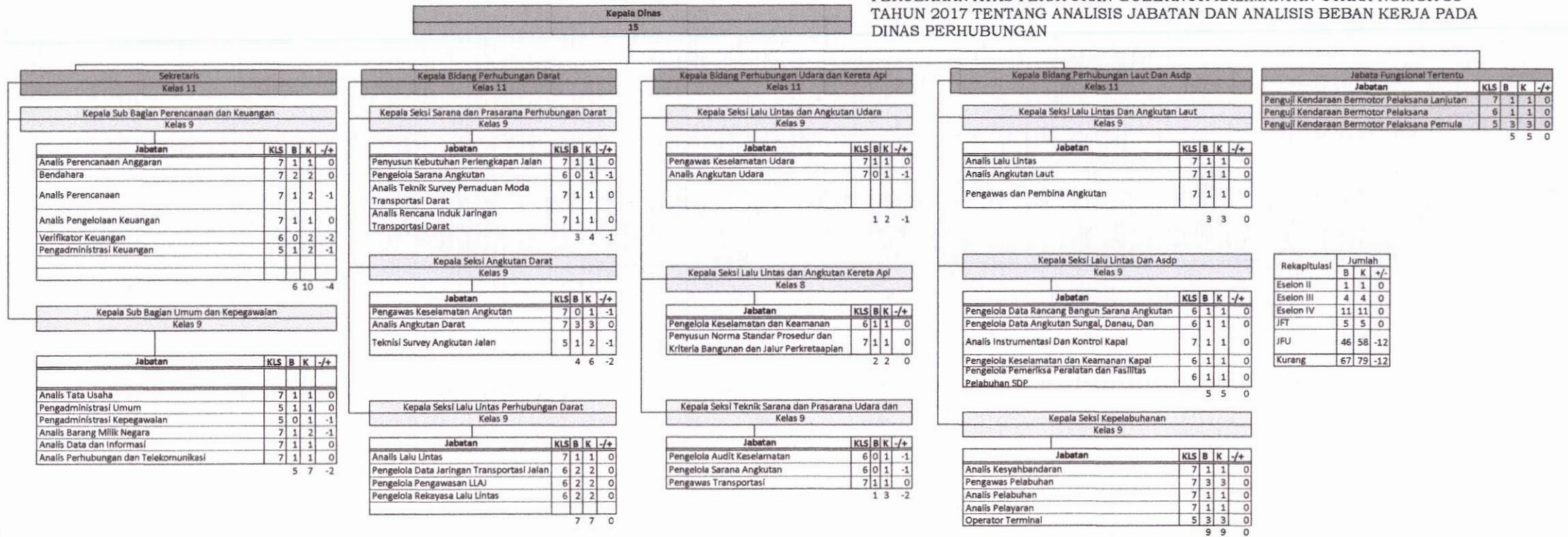
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 85
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN



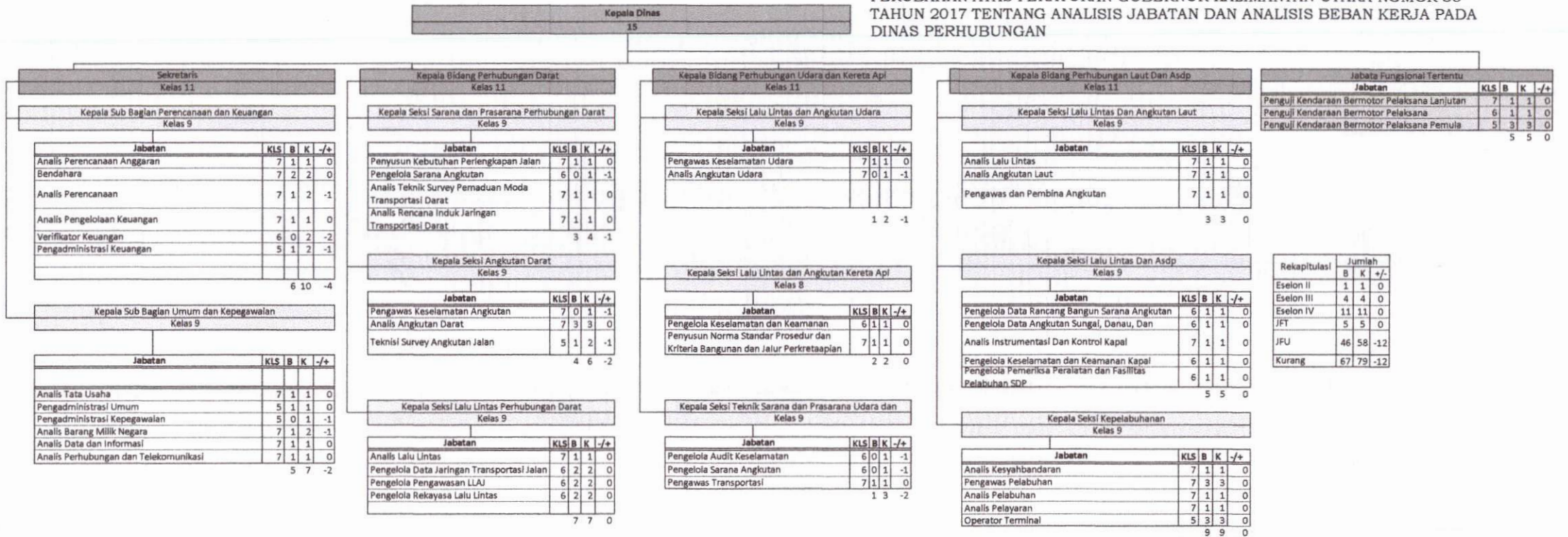
Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 85
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN





Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

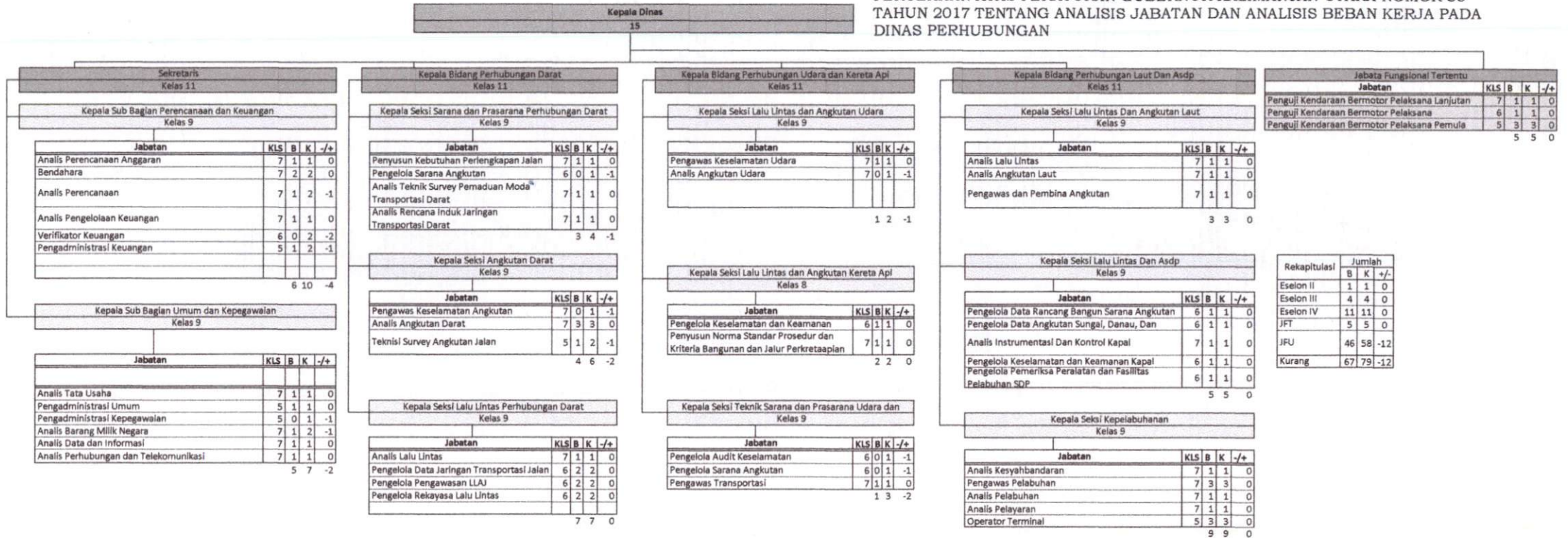

 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAQJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jauhari, S.H	Plt. Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Madjid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 85
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN



Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 59

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE